



LAPORAN KINERJA

**BPPMHKP Surabaya II
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Surabaya II Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban BPPMHKP Surabaya II dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada tahun 2025 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP Surabaya II di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Surabaya, 22 Januari 2026

Pt. Kepala BPPMHKP Surabaya II,

Ricat Pahlefi H, S.St.Pi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BEALAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB II AKUNTABILITAS KINERJA	
2.1 CAPAIAN KINERJA	5
2.2 ANALISIS DAN EVALUASI	7
2.3 REALISASI ANGGARAN	14
BAB III PENUTUP	
3.1 KESIMPULAN	15
3.2 REKOMENDASI	15

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BKIPM Tahun 2025	4
Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKIPM Tahun 2025.....	6
Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Tahun 2025.....	8
Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2025.....	9
Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Tahun 2025.....	10
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2025.....	11
Tabel 2.6 Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2025.....	11
Tabel 2.7 Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2025.....	12
Tabel 2.8 Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2025.....	13
Tabel 2.9 Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2025.....	13
Tabel 2.10 Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2025	14
Tabel 2.11 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Tahun 2025	14

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja BPPMHKP Surabaya II pada Tahun 2025 adalah sebesar 110,99 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Surabaya II yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Seluruh target IKU yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan
2. Berikut uraian 8 IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
 - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
 - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
 - c. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor
 - d. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II
 - e. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II
 - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II
 - g. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II
 - h. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II

Kinerja keuangan BPPMHK Surabaya II tahun 2025 melalui program Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 24.096.271.000-. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Surabaya II tahun 2025 mencapai Rp 22.775.871.289,- atau sebesar 94,52 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Surabaya II merupakan salah satu UPT BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Surabaya II dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Surabaya II. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai PPMHKP Surabaya II serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Surabaya II. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHK menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b) pelaksanaan inspeksi; c) pelaksanaan surveilans; d) pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan; e) pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan, serta racun hayati di perairan; f) Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHK, Kepala Balai PPMHKP Surabaya II dibantu oleh 4 Tim Kerja yaitu Tim Kerja Pengendalian Mutu, Tim Kerja Pengawasan Mutu, Tim Kerja Standarisasi Sistem dan Tim Kerja Dukungan Manajerial dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai PPMHKP Surabaya II sejumlah 42 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 15 pegawai fungsional umum termasuk didalamnya fungsional pranata komputer, fungsional pranata keuangan APBN dan fungsional Arsiparis, dan 25 pegawai fungsional pengawas mutu. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai PPMHKP Surabaya II dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta Strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan sasaran strategi organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai Balai PPMHKP Surabaya II pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai PPMHKP Surabaya II. Pada Triwulan IV tahun 2025 terdapat revisi Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tanggal 8 Desember 2025.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Surabaya II, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				2024	2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	70
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II	99	99
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	100	100

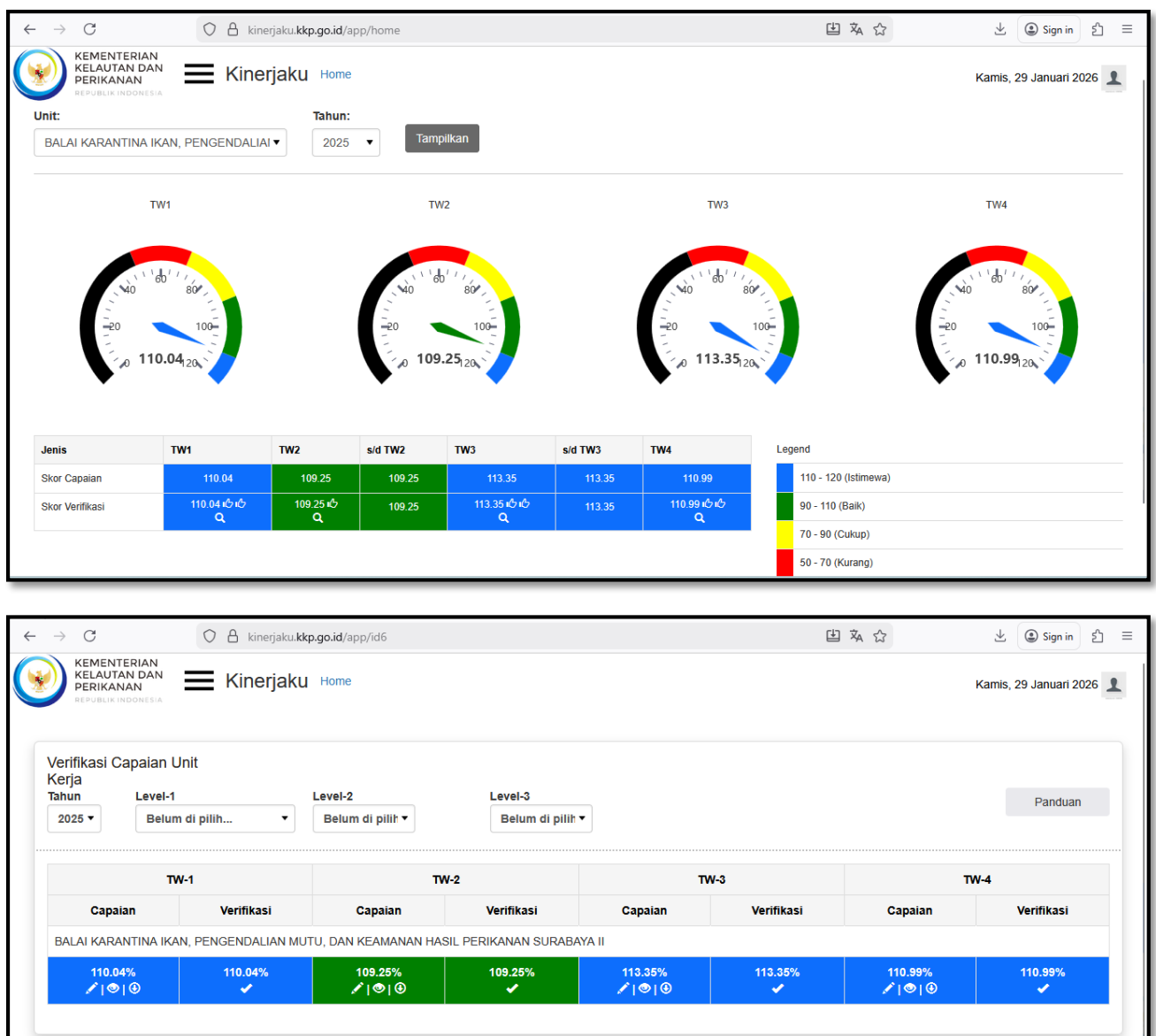
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2024	2025
dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	86	87
	6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II	80	85
	7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II	3,36	88
	8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Surabaya II	82	86

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II Triwulan IV tahun 2025 mendapat predikat Istimewa, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar 110,99 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id



Gambar 2.1 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Balai KIPM Surabaya II Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN	
				TARGET TAHUNAN	REALISASI
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	100
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya II	70	98,90
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II	99	100
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	100	100
		5	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	82	87,59
		6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai KIPM Surabaya II	85	100
		7	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II	3,36	3,88
		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Surabaya II	86	87,85

2.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Strategis 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan diperoleh dari pencapaian indikator ; (1). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, (2). Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dan (3). Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor.

IK1. Presentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI) dan (2). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Pada Triwulan IV tahun 2025, untuk IK 1 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II di targetkan sebesar 70 %. Untuk IKU 1 ini sudah dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebanyak **5 unit pembudidaya yaitu Andik**

Valutama, Achmad Sidiq Cahyono, Mundhofar, Siti Khuzayanah dan Minarsih. Selain itu, juga dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) sebanyak **1 unit pembenihan yaitu Mutiara Fish Farm**, dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sebanyak **2 unit usaha yaitu PT. CJ Feed And Care Indonesia dan PT. Central Proteina Prima Tbk**, dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB) sebanyak **1 unit usaha yaitu PT. Usfa Vet Farma** dan dilakukan Inspeksi sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal pada 48 unit usaha yang terdiri dari 2 (dua) lokasi, yaitu PPI Pasongsongan, Sumenep sebanyak 37 unit dan PPI Campur Rejo, Gresik sebanyak 11 unit.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II Triwulan IV tahun 2025 mencapai 100% sertifikat atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70%.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan IV 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	100	70	100	120	70	120

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada: (1). Standar Nasional Indonesia (SNI); (2). Standar Internasional (Codex Alimentarius); (3). Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2025, untuk IK 2 yaitu Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II di targetkan sebesar 70 %. Untuk IKU 2 ini diperoleh dari capaian penerbitan sertifikat HACCP Tahun 2025 sebanyak 281 sertifikat atau 108,08% dari target yang ditetapkan 260 sertifikat. Selain itu, diperoleh dari capaian penerbitan SKP di Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tahun 2025 sebanyak 288 SKP atau 89,72% dari target yang ditetapkan 321 SKP.

Realisasi persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai KIPM Surabaya II tahun 2025 mencapai 98,90% sertifikat atau 120% dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 70%.

Tabel 2.3
Target dan Realisasi IK2 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	-	-	-	-	100	70	98,90	120	70	120

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh Negara tujuan ekspor

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Realisasi pada IKU Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM Surabaya II Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100 persen dari target triwulan IV yang ditetapkan sebesar 99 persen.

Tabel 2.4
Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan IV Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Triwulan IV 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor	-	-	-	-	99,40	99	100	101,01	99	101,01

Sasaran Strategis 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Balai KIPM Surabaya II diperoleh dari pencapaian indikator; Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II, Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja, Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II dan Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Surabaya II.

IK4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKBKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan

pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Realisasi pada IKU Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II Tahun 2025 sebesar 100 persen, dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 100 persen.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi IK4 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100

IK5. Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator ini pada tahun 2025 mencapai nilai 87.59 atau 106.82% dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 82.

Tabel 2.6
Target dan Realisasi IK5 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Surabaya II	76,88	84,68	84,29	90,47	90,64	82	87,59	106,82	82	106,82

IK6. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk Surat maupun Bab). Pada periode tahun 2025 tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kepada Balai KIPM Surabaya II, karna periode tersebut belum adanya pengawasan dari Inspektorat Jenderal. Sehingga Balai KIPM Surabaya II pada tahun 2025 status *Tuntas*.

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Surabaya II sampai dengan Tahun 2025 mencapai 100% atau (117,65 %) dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 85%.

Tabel 2.7
Target dan Realisasi IK6 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	100	100	100	100	85	100	117,65	85	117,65

IK7. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai KIPM Surabaya II

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkup Balai KIPM Surabaya II menggunakan eletronik SKM (esurvey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat:<http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh seluruh pengguna jasa Balai KIPM Surabaya II.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indikator indeks kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Surabaya II dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,1111$$

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Bobot penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Realisasi pada IKU Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai KIPM Surabaya II pada tahun 2025 sebesar 3,86 atau 114,88 persen dari target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 3,36.

Tabel 2.8
Target dan Realisasi IK7 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2025-2029	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Surabaya II	-	-	95,98	95,23	3,82	3,36	3,86	114,88	3,36	114,88

IK8. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Balai KIPM Surabaya II

Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Surabaya II dalam rangka peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Surabaya II dilakukan dan dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan LKE yang terdapat pada aplikasi kinerja untuk menilai Perencanaan Kinerja (bobot 30%), Pengukuran Kinerja (bobot 30%), Pelaporan Kinerja (bobot 15%) dan Evaluasi Akuntabilitas (bobot 25%). Realisasi indikator ini pada tahun 2025 mencapai nilai 87.85 atau 102.15% dari target tahunan 86.

Tabel 2.9
Target dan Realisasi IK8 pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	Realisasi					Tahun 2025			Renstra 2020-2024	
	2020	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP satker Balai KIPM Surabaya II	-	-	-	-	83,10	86	87,85	102,15	86	102,15

2.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai KIPM Surabaya II pada tahun anggaran (T.A) 2025 sebesar Rp 24.096.271.000,- Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 23.784.271.000,- dan PNPB sebesar Rp 312.000.000,-. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 mencapai Rp 22.775.871.289,- atau sebesar 94,52 %. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Surabaya II berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 2.9 dan Tabel 2.10.

Tabel 2.9
Penyerapan Anggaran per Kegiatan TA. 2025

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM	23.140.721.000,-	22.106.194.174,-	95,53
2	Pengendalian Mutu	377.050.000,-	120.864.820,-	32,06
3	Manajemen Mutu	578.500.000,-	548.812.295,-	94,87
TOTAL		24.096.271.000,-	22.775.871.289,-	94,52

Tabel 2.10
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TA. 2025

	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	15.318.659.000,-	14.608.970.444,-	95,37
2	Belanja Barang	8.777.612.000,-	8.166.900.845,-	93,04
3	Belanja Modal	0,-	0,-	0,00
	TOTAL	24.096.271.000,-	22.775.871.289,-	94,52

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Surabaya II Tahun 2025 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis BKIPM pada tahun anggaran 2025, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap capaian 5 (lima) tahunan sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU Balai KIPM Surabaya II yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa secara umum nilai rata-rata pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 110,99% (kategori Baik)

3.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKU tidak sesuai target yang ditetapkan.